

2021

JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH (J A M)

P - ISSN 2087-9776

E - ISSN 2715-3134



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH ACEH

Vol. 11 No. 3
Edisi: Juli - Desember 2021

- 1. PERKEMBANGAN HASIL RISET PERPAJAKAN DI INDONESIA (STUDI PADA JURNAL TERAKREDITASI TERINDEKS SINTA RISTEK DIKTI TAHUN 2008-2018)**
Adnan dan Heru Fahlevi
- 2. ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh PASAL 21**
Maksalmina
- 3. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Gampong Padang Rubek dan Gampong Pulo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya)**
Nur Peunawa dan Said Mahdani
- 4. ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT. DAIHATSU BANDA ACEH**
Eva Susanti, Cut Fitrika Syawalina dan Nana Ismaida
- 5. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS INSPEKTORAT ACEH TAHUN 2018-2020**
Rusnaldi, dan Feby Ayu Angraini
- 6. PERAN MEDIASI BELANJA MODAL DALAM HUBUNGAN PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**
Surna Lastrri, Surya Fatma dan Hardiansyah
- 7. PENGARUH KETERLIBATAN PEMAKAI, PELATIHAN UKURAN ORGANISASI DAN KEAHLIAN PEMAKAI TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DI BANK BTN BANDA ACEH**
Maidar, Syamsidar, dan Ahlul Rizal
- 8. PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN RESIKO BISNIS SEBAGAI MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019**
Irmawati, Elviza, dan Nova Sri Wilinda
- 9. PENGARUH ARUS KAS OPERASI DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018**
Emmi Suryani Nst, Intan Rizkia Chudri dan Suci Rizka Ramadhani
- 10. PENGARUH MODAL INTELEKTUAL DAN MODAL KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA**
Maya Agustina

JAM

VOLUME 11

NOMOR 3

**HALAMAN
206 - 309**

**BANDA ACEH
2021**

**P-ISSN 2087-9776
E-ISSN 2715-3134**

DEWAN REDAKSI

PEMBINA

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Para Wakil Rektor Unmuha
3. Dekan Fakultas Ekonomi Unmuha

Penanggungjawab:

Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh

Ketua Penyunting:

Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak., CA.

Wakil Ketua Penyunting:

Eva Susanti, SE., M.Si., Ak., CA.

Penyunting Pelaksana:

1. Dr. Dwi Cahyono, M.Si.Akt. (Univ. Muhammadiyah Jember)
2. Dr. Ramli Gadeng, M.Pd (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
3. Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
4. Dr. Sri Suyanta, M.Ag (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
5. Taufik A Rahim, SE, M.Si, Ph D (Univ. Muhammadiyah Aceh)
6. Drs.Tarmizi Gadeng, SE,M.Si. MM (Univ. Muhammadiyah Aceh)

Staf Pelaksana

1. Editor : Irmawati, SE, M.Si, Ak.
2. Adm.& Keuangan : Rusnaldi, SE. M.Si.
3. Distribusi & Pemasaran : Elviza, SE. M.Si.
4. Pengelola IT : Devi Kumala, S.Si, M.T.

Diterbitkan oleh:

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

Jl. Muhammadiyah No. 91 DesaBatoh
Kecamatan Lueng Bata – Kota Banda Aceh

SEKAPUR SIRIH

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Eksistensi dan identitas sebuah Universitas dapat diukur dan dipahami dari kreasi ilmiah dari setiap elemen di universitas tersebut. Makin banyak dan berbobot karya ilmiah yang dihasilkan, makin tinggi pula eksistensi, pemahaman dan penghargaan orang terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan. Kreasi Ilmiah diwujudkan dalam bentuk jurnal. Jurnal adalah sebagai alat komunikasi efektif dengan stakeholder.

Salah satu kreasi ilmiah yang akan menjadi barometer bagi eksistensi, pemahaman dan penghargaan terhadap sebuah universitas adalah publikasi ilmiah baik yang dipublikasikan di berbagai jurnal maupun dalam bentuk *text book* yang dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa dan siapapun yang berminat untuk memahami suatu fenomena ilmiah yang ditulis oleh civitas akademika universitas tersebut.

Berdasarkan perspektif inilah dan ditengah kelangkaan civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh melahirkan karya ilmiah berupa dalam bentuk Jurnal yang bernama Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM), kami amat apresiatif kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Tim Redaksi dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mampu melahirkan salah satu karya yang cukup penting dalam rangka memberi dorongan dan motivasi untuk pengembangan wawasan para staf pengajar dalam penelitian-penelitian ke depan. Jurnal ini, disamping memperkaya khazanah keilmuan juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam studi ilmu akuntansi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi tidak hanya di Universitas Muhammadiyah Aceh akan tetapi juga diseluruh Universitas di Indonesia dan di luar negeri.

Rektor

Dr. Aslam Nur., M.A

SEKAPUR SIRIH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Pertama sekali tidak henti-hentinya secara tulus kita panjatkan puji dan syukur keharibaan Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah dan petunjukNya kepada kita semua sehingga dapat berbuat sesuatu yang selalu mendapat bimbingan sepenuhnya dari Allah SWT. Selanjutnya selawat beiring salam khusus kita persembahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajar dan mendidik ummat manusia sehingga mampu membuka mata hati kita semua dalam melaksanakan berbagai usaha dan kegiatan yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Pada Tahun 1991 Fakultas Ekonomi didirikan melalui melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0230/1991 tanggal 29 April 1991 terdiri dari 2 (dua) program studi yaitu Program Studi Manajemen dan Akuntansi dan terakhir perpanjangan Izin Operasional Program Studi Akuntansi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 1630/D/T/K-I/2009 Tanggal 27 Maret 2009. Selanjutnya pada tahun 2015 Program Studi Akuntansi memperoleh hasil akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 004/BAN-PT/Akred/S/I/2015 Tanggal 09 Januari 2015.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas,Program Studi Akuntansi membuat suatu program pengembangan penelitian staf pengajar/dosen dalam bentuk jurnal yang dinamakan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) dengan nomor P.ISSN 2087-9776 dan E.ISSN 2715-3134 yang dikeluarkan oleh PDII-LIPI serta diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu edisi Januari-Juni dan Juli-Desember.

Dalam rangka penerbitan Jurnal ini, kami selalu membuka diri untuk menerima tulisan-tulisan bermutu, guna dapat kami muat dalam penerbitan-penerbitan berikutnya. Selaku Dekan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengelola dan semua penulis yang telah menyumbangkan karya terbaiknya di jurnal ini sehingga Jurnal Akuntansi volume 11 no.3 Edisi Juli-Desember 2021 ini bisa terbit sebagai kelanjutan dari edisi sebelumnya. Diharapkan terbitan selanjutnya rekan-rekan dari perguruan tinggi Ekonomi khususnya Program Studi Akuntansi se-Indonesia agar dapat menyumbangkan hasil karyanya untuk dapat dimuat pada Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh. Semoga karya para penulis semuanya menjadi ilmu yang menginspirasi kebaikan dan kemanfaatan di dunia ilmu akuntansi.

Sebagai penghargaan perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengelola Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) yang telah bekerja keras melakukan semua proses penerbitan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh, sehingga jurnal ini tampil dalam bentuk dan isi yang berkualitas. Dan akhir kata semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kita mampu menerbitkan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh dengan sebaik-baiknya.

Dekan

Drs. Tarmizi Gadeng, SE.,M.Si, MM

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi	i
Sekapur Sirih Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh	ii
Sekapur Sirih Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh	iii
Daftar Isi	iv
Pedoman Penulisan	v

Jurnal

1. PERKEMBANGAN HASIL RISET PERPAJAKAN DI INDONESIA (STUDI PADA JURNAL TERAKREDITASI TERINDEKS SINTA RISTEK DIKTI TAHUN 2008-2018) <i>Adnan dan Heru Fahlevi</i>	206-211
2. ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh PASAL 21 <i>Maksalmina</i>	212-223
3. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Gampong Padang Rubek dan Gampong Pulo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya) <i>Nur Peunawa dan Said Mahdani</i>	224-231
4. ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT. DAIHATSU BANDA ACEH <i>Eva Susanti, Cut Fitrika Syawalina dan Nana Ismaida</i>	232-245
5. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS INSPEKTORAT ACEH TAHUN 2018-2020 <i>Rusnaldi. dan Feby Ayu Anggraini</i>	246-255
6. PERAN MEDIASI BELANJA MODAL DALAM HUBUNGAN PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH <i>Surna Lastri, Surya Fatma dan Hardiansyah</i>	256-269
7. PENGARUH KETERLIBATAN PEMAKAI, PELATIHAN UKURAN ORGANISASI DAN KEAHLIAN PEMAKAI TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DI BANK BTN BANDA ACEH <i>Maidar, Syamsidar dan Ahlul Rizal</i>	270-279
8. PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN RESIKO BISNIS SEBAGAI MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017–2019 <i>Irmawati, Elviza dan Nova Sri Wilinda</i>	280-291
9. PENGARUH ARUS KAS OPERASI DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018 <i>Emmi Suryani Nst, Intan Rizkia Chudri dan Suci Rizka Ramadhani</i>	292-301
10. PENGARUH MODAL INTELEKTUAL DAN MODAL KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Maya Agustina</i>	302-309

METODE PENULISAN

BENTUK NASKAH

Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian (*research paper*) atau artikel ulasan (*review*) dan resensi buku (*book review*), baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis mengirimkan 2 (dua) eksemplar naskah serta CD bersisi naskah tersebut ke alamat redaksi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah No. 91 Banda Aceh 23245, Telepon 0651-21023, Fax. 0651-21023, e_mail: jurnalfeunmuha@yahoo.com.

FORMAT NASKAH

Naskah yang dikirim terdiri atas 15 s/d 20 halaman kuarto (A4) dengan spasi 1,5, huruf Times New Roman font 12. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul, dan sumber kutipan. Naskah dibuat dalam bentuk 2 kolom kecuali abstrak. Naskah diserahkan dalam bentuk hardcopy (*print out*) dan softcopy dalam CD. Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel yang akan dipublikasikan di Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh. Naskah yang masuk dikategorikan kedalam tiga kategori, artikel hasil penelitian, artikel ulasan dan artikel resensi buku. Sistematika penulisan untuk masing-masing kategori artikel adalah sebagai berikut:

A. Sistematika Naskah Artikel Hasil Penelitian

Judul Naskah

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lebih kurang 200 kata, dan disertai kata kunci (*key word*), maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan.

II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Berisikan referensi yang berhubungan dengan penelitian

III. METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, antara lain meliputi spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian

V. KESIMPULAN DAN SARAN

B. Sistematika Naskah Artikel Ulasan

Judul Naskah

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan disertai dengan kata kunci (*key word*) maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan

II. PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah

III. KESIMPULAN DAN SARAN

C. Sistematika Naskah Artikel Resensi Buku

Naskah ditulis di atas kertas kuarto (A4), terdiri dari 5 s/d 7 halaman, dengan spasi ganda.

Naskah dilengkapi dengan sac sampul buku dirensensi.

Sumber Kutipan

1. Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (*bodynote atau sidenote*).
2. Sumber kutipan yang berasal dari website ditulis dengan susunan sebagai berikut: Nama penulis, judul tulisan (“...”), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download.

Daftar Pustaka

Penulisan daftar Pustaka disusun alfabetis dengan susunan publisitas.

PERAN MEDIASI BELANJA MODAL DALAM HUBUNGAN PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Surna Lastri¹, Surya Fatma², Hardiansyah³

^{1,2} *Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Aceh*

³ *Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh*

surna.lastri@unmuha.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah yang di mediasi oleh belanja modal. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder dari data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015-2019 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *path analysis* dengan bantuan program SPSS Versi 22. Hasil penelitian diketahui bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan pendapatan asli daerah. Dana alokasi umum juga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui mediasi belanja modal pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2015-2019.

Kata Kunci : *Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal*

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Abdullah, 2016).

Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota yang disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana transferan yang bersumber dari APBN, yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU). Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pemberian dana transfer diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal serta agar daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi dana alokasi umum terhadap daerah masih yang tertinggi dibandingkan penerimaan daerah lain termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai indikator untuk mengukur tingkat kemandirian daerah melalui

penerimaan sektor pajak dan retribusi. Namun demikian, indikator ini dianggap tidak selalu tepat karena upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi PAD dalam hal pembiayaan daerah (Adi, 2016).

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih mengharapkan transfer bantuan dana dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi dana perimbangan yang relatif lebih besar. Sehingga disimpulkan bahwa dana alokasi khusus dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan PAD suatu pemerintah daerah (Tuasikal, 2008).

Belanja modal Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh tergolong besar, setiap tahunnya belanja

modal Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh selalu lebih besar hampir dua kali lipat dari PAD Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, hal ini memang harus demikian, karena jika belanja modal kurang maka program-program yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga secara langsung mengindikasikan bahwa besarnya belanja modal tidak bisa ditutupi oleh pendapatan asli daerah dan pendapatan-pendapatan lain yang sah. Sehingga secara umum kabupaten/kota dalam provinsi Aceh masih mengharapkan transferan dana-dana lain seperti dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Tanpa adanya transferan dana-dana lain dari pusat, maka bisa dipastikan belanja modal kabupaten/kota dalam provinsi Aceh menjadi berkurang yang berdampak secara langsung pada tertundanya program-program yang sudah direncanakan. Dengan demikian maka tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah yang di mediasi oleh belanja modal.

II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Munir, 2017:6).

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah” menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kurniawan (2010) mengatakan bahwa DAU bersifat *Block Grant* yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel (dalam artian tidak banyak larangan) seperti halnya hibah kategori. Hibah ini dapat digunakan untuk banyak tujuan sesuai dengan kebutuhan. Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah antar daerah sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya (Munir, 2017:8).

Mardiasmo (2012:42) menyatakan bahwa sebagaimana dijelaskan oleh sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah tahun 2001 bahwa perhitungan DAU didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor murni dan faktor penyeimbang. Faktor murni adalah perhitungan dana alokasi umum berdasarkan formula, sedangkan faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang “Dana Perimbangan” menyatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk

suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017:23). Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017:122).

Menurut Permendagri No. 13/2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Selain itu, jenis pendapatan asli daerah juga dapat dilihat dari pendapatan lain-lain yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan mencakup: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; fasilitas sosial dan fasilitas umum; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan (Baldrick, 2017:83).

Menurut Undang-Undang No. 33/2004 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah" menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pada Pasal 7 Undang-Undang No. 33/2004 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah

dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Belanja Modal (BM)

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD (Halim, 2014:104). Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordian, 2016:51). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal pemerintah

daerah merupakan salah satu jenis belanja langsung dalam APBD dan merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam hal tersebut masuk ke dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 belanja modal terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.

Kemudian menurut Permendagri No. 21 tahun 2011, klasifikasi belanja modal daerah adalah belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam belanja langsung ini dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja modal dilaksanakan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

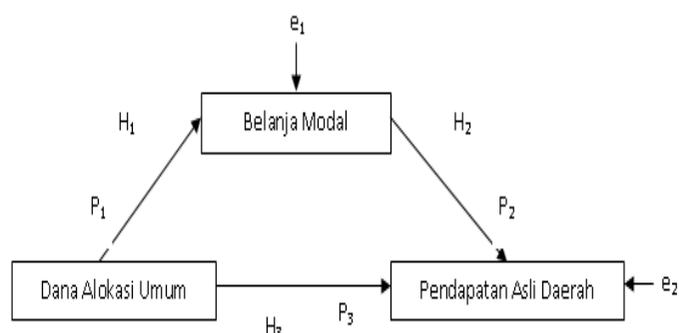
Kerangka Pemikiran

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dana alokasi umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah akan mampu menetapkan belanja langsung yang lebih besar apabila anggaran dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus pendapatan asli daerah semakin besar, begitu sebaliknya pemerintah akan menetapkan belanja modal yang lebih kecil apabila anggaran bagi hasil, dan dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah semakin kecil.

Berdasarkan tinjauan konseptual di atas maka skema paradigma penelitian tentang pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (p3). Namun demikian, Dana Alokasi Umum juga mempunyai hubungan tidak langsung ke Pendapatan Asli Daerah yaitu dari Dana Alokasi Umum ke Belanja Modal (p1) baru kemudian ke Pendapatan Asli Daerah (p2). Total pengaruh hubungan dari Dana Alokasi Umum ke Pendapatan Asli Daerah sama dengan pengaruh langsung Dana Alokasi Umum ke Pendapatan Asli Daerah (koefisien path atau regresi p3) ditambah pengaruh

tidak langsung yaitu koefisien path dari Dana Alokasi Umum ke Belanja Modal yaitu p_1 dikalikan dengan koefisien path dari Belanja Modal ke Pendapatan Asli Daerah yaitu p_2 .

Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara dari kebenaran pada suatu penelitian (Arikunto, 2018:72). Selanjutnya, bertitik tolak dari rumusan masalah dan kerangka konsep maka dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah:

H_1 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2015-2019.

H_2 : Terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2015-2019.

H_3 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2015-2019.

III. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang telah dikemukakan oleh Sekaran (2017:52), tersebut dengan berpedoman pada aspek yang harus terpenuhi. Masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara variabel atau membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel.

Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji teori dengan pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau

menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran, 2017:62). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas dana alokasi umum terhadap variabel terikat pendapatan asli daerah, melalui variabel mediasi belanja modal pada kabupaten/kota Provinsi Aceh.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh. Data sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yaitu 23 kabupaten/kota.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, data yang diperoleh adalah data sekunder dalam hal ini berupa data dana perimbangan dari sektor dana alokasi umum (DAU), data pendapatan asli daerah, dan data belanja modal kabupaten/kota se-Provinsi Aceh yang bersumber dari laporan tahunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Aceh Tahun Anggaran 2015-2019.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menguji apakah besarnya dana alokasi umum yang diterima dapat memprediksi pendapatan asli daerah melalui belanja modal. Jumlah Pendapatan Asli Daerah diukur dengan melihat nilai PAD yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ini diukur dengan melihat nilai DAU yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Variabel Mediasi

Variabel mediasi merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terkait (dependen) menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak bisa diukur dan diamati. Variabel mediasi merupakan variabel antara/ penyela yang terletak di antara variabel bebas (independen) dan variabel terkait (dependen), sehingga variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi timbulnya atau berubahnya variabel dependen (Sugiyono, 2017:153).

Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah belanja modal. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Belanja Modal ini diukur dengan melihat nilai Belanja Modal yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis Jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel mediasi. Analisis Jalur juga menguji kekuatan pengaruh langsung dan tidak langsung. Analisis Jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda atau analisis jalur merupakan penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (Ghozali, 2016). Dalam pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS versi 22.0 for windows.

Selanjutnya, berdasarkan skema kerangka pemikiran di atas pemikiran ditentukan persamaanya analisis jalur sebagai berikut:

- Pengaruh langsung :
DAU ke PAD = p3
- Pengaruh tak langsung :
DAU ke BM ke PAD = p1 x p2
- Total pengaruh :
Korelasi DAU ke PAD = p3 + (p1 x p2)

Pada setiap variabel dependen (endogen variabel) akan ada anak panah yang menuju ke variabel ini dan ini berfungsi untuk menjelaskan jumlah variance yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained variance*) oleh variabel itu. Anak panah dari e1 ke Belanja Modal menunjukkan jumlah variance variabel Belanja Modal yang tidak

dijelaskan oleh Dana Alokasi Umum. Besarnya nilai $e1 = \sqrt{(1 - R^2)}$. Sedangkan anak panah dari $e2$ menuju Pendapatan Asli Daerah menunjukkan variance Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal dan besarnya $e2 = \sqrt{(1 - R^2)}$. Koefisien jalur adalah standardized koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat 2 persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Dalam hal ini ada 2 persamaan tersebut adalah:

$$BM = b1 \text{ DAU} + e1$$

$$PAD = b1 \text{ DAU} + b2 \text{ BM} + e2$$

Standardize koefisien untuk Dana Alokasi Umum (DAU) pada persamaan (1) akan memberikan nilai $p1$. Sedangkan koefisien untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) pada persamaan (2) akan memberikan nilai $p2$ dan $p3$.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti dikemukakan pada rumusan masalah dan hipotesis penelitian yaitu menganalisis pengaruh variabel dana alokasi umum (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y), melalui mediasi belanja modal (Z), maka untuk menjelaskan hipotesis tersebut didasarkan kepada analisis jalur dan regresi linier sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Hipotesis Jalur Model Pertama

Pada hipotesis pertama ini adalah menguji hipotesis H1. Hipotesis pertama yaitu "pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2015-2019", sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Tabel Model Summary Jalur Pertama H1

R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error of the estimate
0,457	0,209	0,202	79,114

Sumber : Data diolah, 2021.

Selanjutnya, uji regresi untuk hipotesis pertama ini dapat dijelaskan tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Uji Regresi Hipotesis Pertama

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	116,571	27,850		4,186	,000
Dana Alokasi Umum	,266	,049	,457	5,459	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai R sebesar 0,457. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Belanja Modal. Sedangkan nilai R Square (R^2) atau nilai koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai R^2 sebesar 0,209 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 20,9%. Dengan kata lain 20,9% perubahan dalam Belanja Modal mampu dijelaskan variabel Dana Alokasi Umum, dan sisanya sebesar

79,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai standardized beta Dana Alokasi Umum (DAU) pada persamaan (1) sebesar 0,457 dan nilai signifikan pada 0,000 yang berarti Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi Belanja Modal (BM). Nilai koefisien standardized beta 0,457 merupakan nilai *path* atau jalur p1. Berdasarkan pengujian di atas maka didapat model persamaan (1) sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = 0,457 \text{ DAU} + e1$$

$$\begin{aligned} \text{Dengan nilai } e1 &= \sqrt{1 - 0,209} \\ &= 0,889 \end{aligned}$$

Persamaan di atas memperlihatkan koefisien variabel Dana Alokasi Umum dengan angka positif (0,889) yang berarti bahwa hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal (BM) adalah positif, yaitu semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat maka semakin besar Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah. Dari hasil uji yang dilakukan diperoleh bahwa hasil uji regresi menerima dan mendukung hipotesis pertama (H1) yaitu dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2015-2019.

2. Hipotesis Jalur Model Kedua dan Ketiga

Pada persamaan (2) terdapat dua hipotesis yaitu H2 dan H3. Pengujian pada hipotesis kedua (H2) yaitu Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen dan Belanja Modal sebagai variabel independen. Hipotesis kedua (H2) ini teletak pada jalur 2 atau *path* 2 dalam hubungan tidak langsung antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Pengujian pada hipotesis ketiga (H3) yaitu

Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen. Hipotesis ketiga (H3) ini teletak pada jalur 3 atau *path* 3 dalam hubungan langsung antara dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Hasil uji regresi pada tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Tabel Model Summary Jalur Kedua H2

R	R2	Adjusted R2	Std. Error of the estimate
0,840	0,706	0,700	38,510

Sumber : Data diolah, 2021

Selanjutnya, uji regresi untuk hipotesis pertama ini dapat dijelaskan tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	82,960	14,326		5,791	,000
Dana Alokasi Umum	,406	,026	,890	15,449	,000
Belanja Modal	,099	,045	,127	2,208	,029

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R bertujuan untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai R sebesar 0,840. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan nilai R Square (R²) atau nilai koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² adalah diantara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai R^2 sebesar 0,706 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen sebesar 70,6%. Dengan kata lain 70,6% perubahan dalam Pendapatan Asli Daerah mampu dijelaskan variabel Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal, sedangkan sisanya sebesar 29,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikuti dalam penelitian ini.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *standardized beta* Dana Alokasi Umum (DAU) pada persamaan (2) sebesar 0,890 dan nilai signifikan pada 0,000 yang berarti Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai koefisien *standardized beta* Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,890 merupakan nilai *path* atau jalur p1. Sedangkan nilai *standardized beta* Belanja Modal (BM) sebesar 0,127 dan nilai signifikan sebesar 0,029 berarti Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai koefisien *standardized beta* 0,127 merupakan nilai *path* atau jalur p3. Berdasarkan uraian di atas maka didapat model persamaan regresi (2) sebagai berikut:

$$PAD = 0,890 DAU + 0,127 BM + e2$$

$$\begin{aligned} \text{Dengan nilai } e2 &= \sqrt{1 - 0,706} \\ &= 0,542 \end{aligned}$$

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) menunjukkan angka positif yang berarti bahwa hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) dengan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah positif, yaitu semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat dan semakin besar alokasi Belanja Modal (BM) yang dikeluarkan pemerintah daerah maka akan semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Dari hasil uji yang dilakukan diperoleh bahwa hasil uji regresi menerima dan mendukung hipotesis kedua (H2) dan hipotesis ketiga (H3).

Pembahasan

Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin besar hibah yang diberikan pemerintah yang berupa dana alokasi ini, maka semakin besar pula alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan angka positif yang berarti bahwa hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal (BM) adalah positif, yaitu semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat maka semakin besar Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah. Dari hasil uji yang dilakukan diperoleh bahwa hasil uji regresi menerima dan mendukung hipotesis pertama (H1) yaitu dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD.

Penelitian yang dilakukan Tuasikal (2008) menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Daerah.

Penelitian Darwanto (2019) menunjukkan kecenderungan yang sama dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah. Perilaku belanja daerah lebih ditentukan oleh besar-kecilnya DAU daripada PAD.

Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin besar dana alokasi umum yang diterima, akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan semakin besar alokasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini berarti hipotesis alternative kedua dan ketiga dinyatakan diterima. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) menunjukkan angka positif yang berarti bahwa hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah positif, yaitu semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat dan semakin besar alokasi Belanja Modal (BM) yang dikeluarkan pemerintah daerah maka akan semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Dari hasil uji yang dilakukan diperoleh bahwa hasil uji regresi menerima dan mendukung hipotesis kedua (H2) dan hipotesis ketiga (H3) serta sesuai dengan teori agency dalam penerapan penganggaran pada sektor publik.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Saragih (2013) yang mengatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebenarnya merupakan ekspos dari pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan investasi. Peningkatan investasi terjadi apabila pemerintah daerah melakukan belanja dalam bidang pembangunan, seperti infrastruktur. Daerah yang potensial cenderung memiliki PAD yang tinggi. Pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Hal ini dinyatakan oleh Mardiasmo (2012) bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekati diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan masyarakat, dan tidak hanya berfokus pada pembangunan atau investasi tanpa diiringi kenaikan pelayanan public untuk masyarakat. Pembangunan infrastruktur sektor industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah (pajak merupakan salah satu komponen terbesar Pendapatan Asli Daerah selain retribusi yang sangat terkait dengan kegiatan sektor industri).

Dana Alokasi Umum Berpengaruh Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan analisis jalur penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah. Pengaruh tidak langsung yaitu dari dana alokasi umum ke belanja modal ke pendapatan asli

daerah. Besarnya pengaruh langsung dana alokasi umum terhadap PAD adalah sebesar 0,890. Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung dana alokasi umum terhadap PAD harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu $(0,457) \times (0,127) = 0,058$ atau total pengaruh DAU ke PAD = $0,890 + (0,457 \times 0,127) = 0,948$. Oleh karena besarnya pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh lebih signifikan terhadap pendapatan asli daerah jika melalui belanja modal.

Hasil penelitian ini juga ditemui Walidi (2014) dalam penelitiannya di kabupaten/kota di Sumatera Utara menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pendapatan per Kapita melalui Belanja Modal. Pengaruh tidak langsung lebih kuat dibandingkan pengaruh langsung. Variabel mediasi digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan per Kapita maupun pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan per Kapita melalui Belanja Modal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2015-2019.
2. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2015-2019.
3. Dana alokasi umum juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui mediasi belanja modal pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2015-2019.

Saran

Untuk menelaah referensi penelitian selanjutnya, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, antara lain :

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel penelitian yang lainnya dalam aspek peningkatan PAD.
2. Mengembang variabel belanja modal dengan memasukkan indikator dari belanja modal sebagai variabel penelitiannya.
3. Kemudian perluasan objek penelitian, bukan hanya pada kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh, tapi juga menambah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, (2016). Local Original Revenue (PAD) as A Source of Development Financing. *Makalah* disampaikan pada konferensi IRSA (Indonesian Regional Science Association) ke 6 di Yogyakarta.
- Adi, Sasmita. (2016). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi (2018). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti dan Joko (2015). Kemandirian Daerah: Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis, *Jurnal Manajemen Usahawan*, Nomor 03 Th XXXV Maret 2015, Lembaga Management FE-UI, Jakarta.
- Baldric, Siregar. (2017). *Akuntansi Biaya*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat,

- Carunia, Mulya. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Darise, Nurlan, (2017). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Darwanto. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung 26-28 Juli 2019.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.
- Haryanto, (2015). Kajian Evaluasi Dampak Penghapusan Kebijakan “*Hold Harmless*” Dalam Alokasi DAU: Pendekatan Model System Dynamics. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Jogiyanto. (2016). *Analisis dan Desain Sistem Informasi, Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Keputusan Mendagri Nomor 120-2818 Tahun 2013 tentang *Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011*.
- Kristanto, Septian Bayu (2013). *Pengaruh Uk uran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern*. Jurnal Akuntansi UKRIDA, Volume 9, No.1.
- Kurniawan. (2010). Analisis Alokasi Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2004-2010. *Jurnal Komunika Bisnis*. Vol 3 No. 2. Universitas Padjajaran
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Mulyana dan Slamate (2012). *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiscal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta: LPKPAP.
- Munir, Dasril. (2017). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, YPAPI.
- Nordiawan, (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah dengan Periode 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, ISSN: 2549-9637. e-resources Universtias Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang *Belanja Modal Pemerintah Daerah/Kota*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 belanja modal Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang *Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

- Prabawati, (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Equilibrium*, Edisi Khusus Oktober 2017.
- Saragih, J. P. 2013. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2017. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk. Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaiful. (2008). *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Bineka Ilmu.
- Syarifin dan Jubaidah (2015). *Analisa Dana Alokasi Khusus Dalam Peningkatan Kemampuan Daerah*. Jurnal ISSN. Vo13 No] :17.
- Tuasikal, Askam. (2008). *Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Voll no 2. Juli 2008 : 142-155.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah.
- Walidi. (2012). *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.